

KAJIAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Oleh

Suardi

Peneliti Bidang Informasi

Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan

RINGKASAN

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti *Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dengan melihat target menuju Masyarakat Informasi (*World Summit International Society-WSIS*) antara lain dari sisi jaringan adalah 1). Terdapat sambungan telpon untuk setiap 100 penduduk, 2). Terdapat pelanggan seluler untuk setiap 100 penduduk, 3). Terdapat sambungan internet Internasional (kb/s setiap penduduk). Sisi pengguna 1). Terdapat pemakaian internet setiap 100 penduduk, 2). Pemanfaatan saluran TV pada setiap rumah tangga, 3). Pengguna komputer setiap 100 penduduk, maka Penerapan e-government menjadi penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antar pemerintahan atau negara. Kajian ini menganalisis perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya dalam program lintas sektoral yaitu e-government dan membandingkan penerapannya oleh negara-negara lain sehingga dapat dirumuskan posisi e-government saat Ini dan upaya kedepan terhadap implementasi e-government di instansi pemerintah khususnya LAPAN yang jauh tertinggal.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi sebagai motor pemicu revolusi digital pada dasarnya 'mengubah jalan', cara berpikir, bertindak, berkomunikasi dan bekerja. Ini telah membentuk cara baru untuk menciptakan pengetahuan,

pendidikan dan menyebarkan informasi. Merubah ekonomi dunia, bisnis, pemerintahan dan politik, bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan serta menciptakan visi baru terhadap kelestarian lingkungan secara cepat. Disaat revolusi digital membuka peluang memperluas batas kesenjangan secara menyeluruh, disisi lain mayoritas masih banyak dibelahan dunia lain yang merasakan sebaliknya. Dengan jurang pemisah antara ketidaktahuan dan pengetahuan, jurang pertumbuhan antara yang kaya dan yang miskin diantara negara semakin meningkat. Oleh karena itu menjadi sangat penting sekali menyelesaikan kesenjangan digital ini dengan mempercepat *Millennium Development Goals-MDGs* pada percepatan jalan pintas menuju keberhasilan teknologi komunikasi dan informasi (*Information Communication Technologies-ICT*).

MDGs adalah suatu "standar" baru dari hasil diskusi global yang bersifat dinamis yang dituangkan dalam bentuk Resolusi 73 tahun 1988 di Minneapolis pada *International Telecommunication Union-ITU*. Resolusi dibentuk atas instruksi Sekretaris Jenderal ITU untuk menyelenggarakan suatu konferensi tingkat dunia tentang Masyarakat Informasi (*World Summit International Society-WSIS*) dan menempatkannya pada agenda Komite Administrasi dan Koordinasi PBB (*United Nations Administrative Committee on Coordination-ACC*), yang sekarang bernama Dewan Kepala Eksekutif Sistem PBB (*the United Nations System Chief Executive Board - CEB*). Konferensi akan berada di bawah pengawasan tinggi Sekjen PBB dan ITU bertindak sebagai pemimpin dalam persiapannya. Tahun 2001, ITU memutuskan mengadakan konferensi tingkat dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) dalam dua tahap. Tahap yang pertama mengambil tempat di Geneva (Switzerland) dari 10 - 12 Desember 2003. Tahap yang kedua berlangsung di Tunis (Tunisia) dari 16-18 November 2005.

Pada MDGs ada beberapa hal penting yang menjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara di dunia dalam membangun dan menjalin hubungan internasional diabad 21 yaitu: a) Kebebasan (*Freedom*); dimana laki-laki, perempuan dan anak-anak memiliki hak dan martabat yang sama dalam memperoleh kebebasan hidup, demokrasi, dari rasa lapar dan tekanan atau rasa takut dan perlakuan tidak adil, b) Persamaan (*Equality*); setiap individu memiliki hak untuk berkembang, c) Kesetiakawanan (*Solidarity*); tantangan global

dimasa depan harus dihadapi dengan saling membantu bagi yang memerlukan, d) Kebijakan terhadap sumber daya alam (*Respect for Nature*); kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam, e) Tanggung jawab bersama (*Shared Responsibility*); merupakan tanggung jawab bersama dalam mengelola dan membangun sosial ekonomi dunia yang meliputi: keamanan dan perdamaian internasional secara multilateral melalui wakil-wakil organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa.

Menindaklanjuti MDGs untuk kawasan Asia Pasific diadakan Konferensi Regional yang berlangsung di Tokyo Jepang 13-15 Januari 2003. Deklarasi Tokyo lahir untuk menyatakan strategi dan visi bersama mengenai Masyarakat Informasi. Sasaran dari konferensi adalah mendiskusikan bagaimana bekerja sama untuk berperan dalam transisi efektif terhadap kawasan/daerah-daerah menuju suatu Masyarakat Informasi yang membawa dampak terhadap percepat dan peningkatan ekonomi, budaya dan pengembangan teknologi. Hal ini selaras dengan sasaran dari tahap pertama WSIS, yang mana untuk menyediakan suatu platform global sebagai kunci dari berbagai pengambil keputusan untuk mengembangkan suatu pemahaman dan visi menyangkut masyarakat informasi dengan mengadopsi deklarasi serta rencana kegiatan.

Dalam Deklarasi Tokyo salah satunya dikemukakan bahwa untuk mempercepat pembentukan masyarakat infomasi diperlukan tindakan dan prioritas program lintas sektoral yang meliputi; 1). e-government, 2). e-busines, 3). e-learning, 4). e-health.

Perkembangan telematika sebagai awal inisiatif penerapan e-government di Indonesia sendiri telah dimulai awal tahun 2005 dengan digabungkannya Ditjen Postel yang dahulu berada dibawah Departemen Perhubungan kedalam Depkominfo. Begitu juga dengan ditetapkan regulasi melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, media dan Informatika) dan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, sebagai dasar acuan bagi penyelenggaraan e-government di pusat dan daerah.

Sayangnya semua itu belum disertai beberapa peraturan sebagai payung hukum dalam menerapkan TIK untuk mendukung e-government seperti RUU tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang masih dibahas di

DPR. Dalam bidang kebijakan, kelihatannya pemerintah belum berhasil menyusun suatu langkah konkrit yang dapat menggerakkan berbagai komponen pemerintah dalam arti lintas sektoral untuk saling bekerja sama membangun dan menjalankan aplikasi yang memang harus disinergikan. Hingga sekarang pemanfaatan telematika untuk Kartu Tanda Penduduk, imigrasi, dan Kepegawaian yang sangat dibutuhkan dalam reformasi pemerintah masih belum terlaksana. Masih malahnya tarif internet, termasuk *broadband*. Begitu pula alternatif penyediaan infrastruktur telematika di daerah terpencil, perbatasan masih belum bisa memaksimalkan pemanfaatan dana Universal Service Obligation (USO) yang telah dikutip dari operator.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran praktek/kaidah terbaik (*best practice*) yang telah dilakukan negara-negara lain khususnya kawasan Asia Pasific dalam penerapan e-government dengan tujuan dapat dijadikan bahan pembandingan sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya di Lembaga Pemerintah seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan pengembangan ICT di Indonesia pada umumnya.

1.3. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melihat perkembangan TIK khususnya dalam program lintas sektoral yaitu e-government dan membandingkan penerapannya oleh negara-negara lain. Dengan hasil perbandingan tersebut dapat dirumuskan posisi e-government saat Ini dan upaya kedepan terhadap implementasi e-government di instansi pemerintah khususnya LAPAN.

2. PENGERTIAN E-GOVERNMENT PENERAPANNYA DALAM Mendukung MDGs

2.1 Pengertian E-government

E-Government menurut definisi dari The World Bank Group adalah: *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide*

Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Definisi dari referensi lain mengatakan: E-Government refers to the use of information technology to free movement of information to overcome the physical bounds of traditional paper and physical based system in government services to benefit citizens, business partner and employees.

Pada intinya E-Government adalah penggunaan TIK pada berbagai platform pelayanan yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. E-gov mengacu pada penggunaan TIK dalam mekanisme penyampaian kebebasan informasi untuk menanggulangi batas pelayanan pemerintah yang masih menggunakan kertas dan sistem tradisional agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, bisnis dan antar pemerintah sendiri.

2.2 Peranan E-government dalam mendukung MDGs

Bukanlah suatu hal yang mudah dalam merumuskan dan menjelaskan implementasi e-government. Organisasi internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)* dan *Organization Economic Cooperation and Development (OECD)* telah berusaha merumuskannya dalam berbagai usulan. Diperlukan suatu usaha yang bersifat nasional dan internasional. Usaha itu telah dilakukan dan melibatkan Komite pemberantasan kemiskinan Perserikatan Bangsa-bangsa *United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP)*, *Millennium Development Goal- MDGs* dan Komisi pemberantas Kemiskinan milik *World Bank*. Semua berperan dalam meningkatkan jasa komunikasi dan arus informasi untuk pementasan kemiskinan, tetapi pada suatu tempat akan terdapat suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Di daerah pedalaman yang miskin, dimana produktivitas agrikultur rendah dan tak menentu disertai kelemahan pangan, pengetahuan dan pertukaran informasi akan menjadi suatu hal yang penting dalam dalam mengurangi kemiskinan.

Salah satu upaya peningkatan pementasan kemiskinan adalah dengan peningkatan penetrasi akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti yang dinyatakan oleh *World Bank*. *Workshop Regional* yang diselenggarakan di Bangkok, 31 Mei – 4 Juni 2004 dihadiri oleh negara-negara dikawasan Asia Pasifik dibahas mengenai

tantangan dalam menerapkan program e-government di negara masing-masing. Mereka berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan e-government. Kerjasama praktisi di tingkat regional diharapkan dapat mendukung *Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs)* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.3 Manfaat E-government dan kemungkinan pengembangannya

E-government sebagai upaya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan *cost-effective* pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat. Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh dari penerapan e-government diantaranya:

- a) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pada setiap tingkat pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference.
- b) Meningkatkan hubungan antara pemerintah (*G2G-Government to Government*), pelaku bisnis (*G2B-Government to Business*) dan masyarakat umum (*G2C-Government to Citizens*). Dengan adanya transparansi diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
- c) Pelurusan garis birokrasi dalam operasi pemerintahan untuk menjamin kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat.
- d) Memudahkan masyarakat, dunia bisnis, karyawan dan level pemerintah lainnya dalam menemukan informasi dan mendapatkan layanan dari pemerintah.
- e) Memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
- f) Menyederhanakan proses bisnis dan mengurangi biaya melalui integrasi dan penghapusan system yang berlebihan.

Perkembangan teknologi informasi kian hari semakin begitu pesat dan semakin murah, sehingga efisiensi yang ditawarkan menjadi semakin menarik minat masyarakat. Tak ketinggalan pemerintah juga harus turut memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Betapa tidak semakin meningkatnya volume pekerjaan dan semakin menggiurkannya tarawaran dari TIK yang menjanjikan suatu hasil yang efisien, produktif, transparansi, adil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali. Ini merupakan tujuan dari pengembangan E-government. Pengembangan e-government ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan di sektor lain. Menurut penelitian ITU setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

Teknologi Informasi juga diharapkan mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi. Dalam reformasi birokrasi juga mempunyai sasaran yang sama dengan e-government yaitu bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan publik dapat lebih efisien, efektif, transparan dan memberikan layana secara non-diskriminatif atau dikenal dengan layanan prima.

3. BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT NEGARA-NEGARA DI ASIA PASIFIK

3.1 Malaysia

Malaysia telah membuat suatu kemajuan penting dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan TIK. Sejak 1997 pemerintah Malaysia telah membangun infrastruktur TIK dengan investasi RM 556,22 juta atau setara dengan US\$150,33 juta. Saat itu pengembangan TIK mereka meliputi pemanfaatan web dan e-mail, jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), dan sistem manajemen dokumen pemerintahan. Delapan rencana besar pemerintah Malaysia sejak Oktober 2003 telah dilakukan untuk mewujudkan e-government. Delapan rencana ini meliputi: 1) Rencana TIK Nasional, 2) Pengembangan Infrastruktur Nasional, 3) Akses informasi masyarakat, 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 5) Kebijakan hukum, 6) Perdagangan dan bisnis secara elektronik, 7) Kelembagaan Informasi, 8) Pengembangan inovasi TIK. Dengan memanfaatkan TIK dan Delapan rencana besar Malaysia, maka penanganan *knowledge based* ekonomi yang kompetitif lebih ditekankan. Untuk mendukung hal ini infrastruktur TIK lebih ditekankan terutama pada daerah pedesaan untuk

mengatasi kesenjangan digital dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi.

3.2 Korea

Proyek 'Sistem Informasi dasar nasional' diterapkan untuk pertama kali sebagai langkah awal dimulainya e-government oleh pemerintah Korea pada pertengahan tahun 80-an. Melalui proyek ini informasi nasional yang sistematis dimasukkan ke dalam suatu database untuk menunjang administrasi pemerintah yang lebih cepat. Database menyangkut masalah kependudukan, tempat tinggal, sarana angkutan dan lain-lain. Aplikasi ini dapat dijalankan dimana saja dan kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Sejak tahun 90-an infrastruktur informasi Korea dibangun dengan berorientasi pada perekonomian. Infrastruktur komunikasi dan informasi kelas dunia dengan *bandwidth* internet yang lebar dibangun untuk menunjang kemajuan dalam informatisasi disegala aspek pemerintahan. Pendaftaran kependudukan, permohonan paten, jasa administrasi militer dan pertukaran *e-document* dalam pemerintahan dapat dilakukan secara online. Pada bulan Juni 1999 Kementerian Administrasi dan Kementrian Komunikasi dan Informasi bersama-sama membentuk suatu kerangka sistematis dan rencana menyeluruh untuk implementasi e-government.

Usaha Korea untuk menerapkan e-government bahkan dipercepat oleh penetapan dari panitia khusus untuk e-government. Panitia terdiri dari tenaga ahli dan para profesional dari sektor swasta dan akademis dibawah koordinasi Presiden. Panitia secara terus menerus mendukung dan memonitor 11 prakarsa *high-payoff*. Prakarsa ini telah diterapkan dan dijalankan sejak November 2002.

| Jenis | Prakarsa |
|--|---|
| Jasa inovasi untuk bisnis dan warga negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu jendela e-government (G4C) 2. Portal jasa asuransi sosial 3. Jasa pajak rumah 4. Jasa e-procurement nasional (G2B) |
| Peningkatan efisiensi administrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi keuangan nasional 2. Sistem informasi pendidikan nasional 3. Informatisasi pemerintahan lokal 4. Sistem pendukung kebijakan personal 5. Perubahan elektronik dokumentasi dan persetujuan elektronik |
| Penetapan infrastruktur e-government | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan elektronik dan cap elektronik 2. Tahapan implementasi System integrasi komputer pemerintahan (BPR/ISP) |

Portal E-Government yang menyediakan jasa yang meliputi 70% dari semua jasa kependudukan, perumahan, sarana angkutan dan pajak telah dibangun. Sistem Pemerintah untuk warganegara (Government for Citizen-G4C) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari 4000 kantor pemerintah dan 393 dokumen pejabat melalui portal pemerintahan, antara lain meliputi pendaftaran sensus menyalin dan mengenakan pajak sertifikat pembayaran ke dokumen pendaftaran bisnis, dan menerimanya melalui email atau dikantor dekat. Portal tunggal E-Government telah dibangun melalui informatisasi 21 tugas-tugas umum dari kantor pemerintah lokal yang meliputi perumahan, sarana angkutan, daftar keluarga dan lain lain. Pembangunan sistem informasi administratif menyeluruh yang memungkinkan informasi untuk bersama dan terintegrasi antar kantor juga mendukung jasa dari portal tunggal E-Government. Sebagai tambahan, jumlah dokumen yang diperlukan dalam rangka

menerima pelayanan sipil telah sangat mengurangi pemerintah dalam memverifikasi informasi melalui portal tunggal E-Government. Ini tidak lagi diperlukan untuk menyampaikan 20 macam dokumen sipil yang berbeda seperti salinan pendaftaran penduduk, catatan dan abstrak daftar konsensus, dan lain lain. Sebagai gantinya, pejabat akan memandangnya secara online.

4. STATUS DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

4.1 Aplikasi e-government dan infrastruktur

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia dan Korea Selatan, nampaknya percepatan penerapan TIK untuk mendukung e-government masih tertinggal.

Situs-situs Institusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat juga diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak dicanangkannya percepatan pengembangan e-government telah tumbuh banyak situs pemerintah yang beroperasi dengan pilihan lengkap pada websitenya. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa e-government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap *full-electronic delivery service* perlu diupayakan. Sementara itu menciptakan komunikasi dua arah bisa dilaksanakan dengan menginformasikan satu atau lebih email address, nomor telepon, dan faximile pada website untuk meningkatkan minat dan kesempatan masyarakat dalam menggunakan pelayanan dan memberikan umpan balik.

Dilihat dari data pelaksanaan aplikasi e-government (Depkominfo, 2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 Indonesia baru memiliki: a) 564 domain go.id; b) 295 website pemerintah pusat dan pemda; c) 226 website telah memberikan layanan publik; d) dan 198 website pemda masih dikelola secara aktif, seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Bantul dan Pemkab Malang.

Sementara dari sisi infrastruktur, layanan telepon tetap masih dibawah 8 juta satuan sambung (ss) dan jumlah wartel dan warnet yang terus menurun karena tidak sehatnya persaingan bisnis. Menurut data Depkominfo, kuartal pertama 2006 pengguna telepon seluler telah mencapai 24 juta ss dan kepadatan telepon tetap di beberapa kota besar bisa mencapai 11% - 25%. Kepadatan telepon di beberapa wilayah yang relatif tertinggal baru mencapai 0.2%. Jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam bentuk akses telepon baru mencapai 65% desa dari total sekitar 67.800 desa yang ada diseluruh tanah air.

Jumlah pelanggan dan pengguna internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet (APJI) memberikan jumlah pelanggan internet masih pada kisaran 2.4 juta. Rendahnya penetrasi internet jelas bukan suatu kondisi yang baik dalam mengurangi lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*).

4.2 Analisa Posisi E-government Indonesia khususnya LAPAN

Penerapan e-government di LAPAN sudah dituangkan pada Rencana dan Strategi (Renstra) LAPAN 2005 - 2009. Pada misi ke 4 secara eksplisit dijelaskan salah satunya adalah meningkatkan implementasi e-government dilingkungan LAPAN dan komunikasi informasi kedirgantaraan antara LAPAN dan Instansi terkait di dalam dan di luar negeri.

Sesuai dengan kebijakan Ketua LAPAN yaitu pada setiap tingkat Eselon II dihimbau untuk mempunyai satu website yang menggambarkan dan memberikan informasi tentang unit yang bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menyeragamkan nama domain website yang telah akan dibangun menjadi www.namapusat atau unit teknis.lapan.go.id, misalnya www.bdg.lapan.go.id untuk website LAPAN Bandung, www.pted.lapan.go.id untuk LAPAN Rumpin, dan www.rs.lapan.go.id untuk LAPAN Pekayon.

Seperti halnya situs instansi pemerintah yang lain, bentuk pelayanan yang diberikan pada situs unit kerja atau pusat-pusat di LAPAN masih sebatas hanya dapat memberikan informasi publikasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang sifatnya satu arah di masing-masing pusat atau satuan kerja. Dengan demikian informasi dua arah masih perlu dilakukan dengan menginformasikan

email address, nomor telepon dan faximile pada website untuk meningkatkan minat dan kesempatan masyarakat dalam menggunakan pelayanan dan memberikan umpan balik.

Selain masalah bentuk pelayanan yang masih bersifat satu arah, beberapa permasalahan yang menjadi kendala pengembangan e-government di LAPAN antara lain: 1) Sulitnya melakukan koordinasi untuk mensinergikan kebijakan dan kewenangan dalam menyatukan persepsi terhadap unsur-unsur pendukung dalam mengimplementasikan e-government, salah satu contoh dari dampak tersebut adalah ada beberapa unit kerja yang memiliki lebih dari satu website, tetapi di unit kerja yang lain belum ada karena tidak tersedianya anggaran pembangunannya, 2) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Pusat/Unit kerja yang masih terbatas, 3) Dukungan infrastruktur yang belum siap di beberapa unit kerja, 4) Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah belum adanya *masterplan* e-government yang memberikan arah dan tahapan yang pasti dan tentunya sesuai dengan kondisi di LAPAN itu sendiri.

Permasalahan diatas perlu segera diupayakan jalan keluarnya mengingat LAPAN merupakan institusi pemerintah yang menjadi salah satu pendukung terwujudnya e-government di Indonesia. Langkah-langkah sebagai solusi yang harus segera dilakukan adalah upaya yang berkesinambungan dengan memperhatikan dan mengupayakan *master plan* yang sesuai dengan kondisi di LAPAN. Revitalisasi yang menyangkut unsur-unsur pendukung e-government seperti: sumber daya manusia, infrastruktur dan kebijakan sebagai payung hukum dan motivator harus dapat sesegera mungkin diwujudkan.

5. KESIMPULAN

Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Di era globalisasi penerapan e-government penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antar pemerintahan atau negara.

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan e-government serta hasil-hasil yang telah dicapai hingga saat ini

pada umumnya di Indonesia dan khususnya di LAPAN, maka sebaiknya konsep dan strategi pelaksanaan e-government membutuhkan penyempurnaan diberbagai sisi. Hal ini perlu segera dilakukan agar cita-cita reformasi yang sebenarnya, yaitu memperbaiki mutu pelayanan publik kepada seluruh masyarakat serta pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan efisiensi birokrasi. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-government karena pada saat ini e-government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih luas.

DAFTAR RUKUKAN

Good Practices in Information and Communication Technology Policies in Asia and The Pacific, 2004, *Technology Development in the Asia-Pacific Region*. United Nations

Search engine Google, dengan kata kunci "e-government".

Satrya, Eddy, Pentingnya revitalisasi e-government di Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional TIK di Indonesia, 2006

Word Information Society Report , Juni 2007